

STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN PADA INDIKATOR DIMENSI EKONOMI DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Dhita Eka Pramita Hesti¹, Ibrahim Ali²

¹Mahasiswa Magister Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Mataram,

²Dosen Magister Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Mataram,

dhita.hesti80@gmail.com

Keywords:

Strategies, Rural Area
Development, Economic
Dimensions

Abstract: The aim of this study is to analyze and identify effective strategies for rural area development, with a specific focus on economic dimensions indicators in Central Lombok Regency. The research methodology employed a qualitative approach, utilizing data collection through Focus Group Discussion (FGD) mechanisms and structured interviews with selected respondents knowledgeable about the existing rural development conditions in Central Lombok Regency. The research findings highlight that collaboration among local government, local economic actors, and other relevant stakeholders is crucial for the successful implementation of holistic development strategies. The implications of this research underscore the importance of formulating policies that prioritize economic sustainability, community empowerment, and enhanced access to markets and technology. By seriously considering economic dimension indicators in development decision-making processes, it is anticipated that the welfare and economic resilience of rural areas in Central Lombok Regency can be enhanced. In terms of economic dimensions, rural areas with prominent tourism commodities have developed their commodities; however, community involvement in developing these flagship commodities remains limited, despite existing interconnections among rural areas for the development of flagship products.

Kata Kunci:

Strategi, Pengembangan
Kawasan Perdesaan,
Dimensi Ekonomi

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi strategi yang efektif dalam pengembangan kawasan perdesaan, dengan fokus khusus pada indikator dimensi ekonomi di Kabupaten Lombok Tengah. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara terstruktur terhadap responden terpilih, yang memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi perkembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Lombok Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku ekonomi lokal, dan pihak terkait lainnya merupakan kunci keberhasilan dalam implementasi strategi pengembangan kawasan perdesaan yang komprehensif. Dengan mempertimbangkan indikator dimensi ekonomi secara serius dalam pengambilan keputusan pembangunan, diharapkan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi kawasan perdesaan di Kabupaten Lombok Tengah dapat meningkat. Berdasarkan analisis dimensi ekonomi, kawasan perdesaan yang memiliki komoditas unggulan padi dan tembakau ini telah mengembangkan potensinya, namun keterlibatan masyarakat masih minim. Meskipun demikian, sudah terdapat keterkaitan antara kawasan perdesaan satu dengan yang lainnya dalam rangka pengembangan produk unggulan.

Article History:

Received: 30-05-2024

Online : 22-06-2024



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



◆

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota (KEMENDES-PDPT, 2016). Dengan tujuan membantu masyarakat agar dapat mandiri, membebaskan masyarakat desa dari keterbelakangan sosial, pendidikan, ekonomi, politik dan sebagainya (Cahyo Diarto et al., 2017). Kabupaten Lombok Tengah, wilayah yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, merupakan bagian dari Pulau Lombok yang terkenal dengan keindahan alamnya. Dengan letaknya yang strategis di antara Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur, wilayah ini menjadi tempat tinggal bagi beragam komunitas etnis dan budaya yang hidup berdampingan. Demografi penduduknya mencerminkan keberagaman yang kaya, dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani atau buruh tani. Latar belakang ekonomi dan sosial masyarakatnya tercermin dari dominasi sektor pertanian dalam pola mata pencaharian, namun juga ditandai dengan upaya diversifikasi ekonomi yang semakin berkembang, terutama di sektor pariwisata yang menjadi salah satu potensi utama di wilayah tersebut.

Pengembangan kawasan pedesaan merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan (Soleh, 2017). Kawasan pedesaan memiliki peranan vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi pedesaan berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dengan sektor pertanian menjadi salah satu penggerak utamanya. Selain itu, pengembangan kawasan pedesaan juga dapat menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas, terutama bagi masyarakat lokal yang mayoritasnya bergantung pada sektor pertanian. Pemerintah daerah harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai kondisi, kebutuhan, serta potensi yang ada di wilayah pedesaan (Wahyuni, 2019). Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, kawasan pedesaan Kabupaten Lombok Tengah juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang harus diatasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kawasan pedesaan di Kabupaten Lombok Tengah menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kawasan pedesaan di Kabupaten Lombok Tengah menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan akses terhadap infrastruktur, khususnya dalam hal transportasi dan akses ke pasar. Hal ini menghambat mobilitas barang dan orang serta menurunkan daya saing produk lokal. Selain itu, tingkat investasi yang rendah di sektor pedesaan juga menjadi kendala serius yang membatasi pengembangan potensi ekonomi daerah. Tidak hanya itu, ketidaksetaraan ekonomi antar wilayah juga menjadi masalah yang perlu diperhatikan, di mana beberapa daerah pedesaan masih tertinggal dalam hal akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi dibandingkan dengan wilayah lainnya di Kabupaten Lombok Tengah. Dalam proses penyusunan kebijakan,

pemerintah daerah mampu mengidentifikasi beragam isu strategis yang perlu diberi perhatian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, seperti akses terhadap infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi (Iskandar, 2021). Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan-tantangan ini guna membangun strategi pengembangan kawasan pedesaan yang efektif dan berkelanjutan.

Indikator dimensi ekonomi memiliki peran yang penting dalam mengukur dan memahami perkembangan ekonomi kawasan pedesaan. Dengan menggunakan indikator ini, kita dapat mengevaluasi kesehatan ekonomi suatu wilayah, mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian khusus, dan melacak kemajuan dari waktu ke waktu. Relevansi dari indikator-indikator ini terletak pada kemampuannya untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi ekonomi pedesaan, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif dalam perencanaan pembangunan ekonomi. Partisipasi aktif masyarakat memegang peranan utama dalam pembangunan pedesaan karena memungkinkan mereka untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Melalui partisipasi ini, masyarakat diberdayakan untuk turut serta dalam mencapai tujuan pembangunan serta memanfaatkan potensi daerah mereka secara efektif (Yuswarni et al., 2023).

Sejarah pengembangan kawasan pedesaan di Kabupaten Lombok Tengah memberikan wawasan penting tentang evolusi kebijakan dan program-program pembangunan yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan mempelajari sejarah ini, kita dapat mengidentifikasi pola-pola yang muncul, mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan dari upaya-upaya sebelumnya, dan menarik pelajaran yang berharga untuk perencanaan masa depan. Beberapa kebijakan atau program yang telah dilakukan termasuk program-program pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur pedesaan, pengembangan koperasi petani, pelatihan keterampilan, dan stimulus untuk diversifikasi ekonomi. Evaluasi dampak dari kebijakan-kebijakan tersebut terhadap dimensi ekonomi memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang efektivitasnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan.

Tinjauan literatur terdahulu mengenai pengembangan kawasan pedesaan dan dimensi ekonominya di Indonesia, termasuk wilayah yang memiliki kesamaan dengan Kabupaten Lombok Tengah, menjadi langkah penting dalam memahami konteks penelitian ini. Meskipun banyak penelitian telah dilakukan dalam bidang ini, terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diatasi. Beberapa kesenjangan yang dapat diidentifikasi meliputi keterbatasan dalam cakupan geografis dan metodologi, kurangnya fokus pada aspek-aspek tertentu seperti pengaruh globalisasi atau perubahan iklim, dan kekurangan dalam pengintegrasian perspektif partisipatif masyarakat lokal. Oleh karena itu, penelitian tambahan yang memperdalam pemahaman tentang pengembangan kawasan pedesaan dan dimensi ekonominya, khususnya di Kabupaten Lombok Tengah, sangat diperlukan untuk mengisi kesenjangan tersebut.

Untuk menyederhanakan kompleksitas perkembangan kawasan pedesaan, dilakukan verifikasi kriteria yang dapat mewakili karakteristik suatu wilayah tertentu. Dari hasil sintesis tersebut, Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan dibagi dalam 5 dimensi yang dapat mewakili karakteristik wilayah, yaitu Dimensi Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan, Jejaring Prasarana dan Sarana, serta Kelembagaan, namun dalam penelitian ini hanya akan ditinjau dari dimensi ekonominya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyusun strategi pengembangan kawasan pedesaan yang berfokus pada indikator dimensi ekonomi di Kabupaten Lombok Tengah. Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Kabupaten Lombok Tengah.

B. METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan strategi pengembangan kawasan perdesaan berdasarkan indikator dimensi ekonomi di Kabupaten Lombok Tengah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data dilakukan melalui mekanisme Focus Group Discussion (FGD) yang merupakan sebuah metode diskusi yang dilakukan secara sederhana, dan dapat dilakukan di dalam maupun di luar ruangan. Peserta FGD terdiri dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Desa serta Stakeholder yang terkait. Selain dengan metode FGD, pengumpulan data juga dilakukan menggunakan metode studi pustaka dengan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari Dinas PMPD DUJCAPIL Provinsi NTB khususnya pada Bidang Penataan dan Kerjasama Desa. Metode lain yang digunakan adalah wawancara terstruktur terhadap responden terpilih, atau orang yang memahami dan menguasai kondisi eksisting perkembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Lombok Tengah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menilai, dan mensintesis penelitian-penelitian yang relevan guna memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang topik yang diteliti.

Pengambilan data dalam penelitian ini difokuskan pada desa yang sudah ditetapkan sebagai kawasan perdesaan yaitu di Kecamatan Praya Barat (Desa Mekarsari, Desa Banyu Urip, Desa Kateng, Desa Bonder, Desa Mangkung dan Desa Selong Belanak), Kecamatan Pujut (Desa Prabu dan Desa Tumpak) serta Kecamatan Praya Barat Daya (Desa Montong Ajan). Data ini kemudian disintesis untuk mengidentifikasi strategi yang efektif dalam pengembangan kawasan perdesaan berdasarkan indikator dimensi ekonomi di Kabupaten Lombok Tengah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan kawasan perdesaan merupakan salah satu pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan desa dan kawasan perdesaan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Setkab, 2016), maka legalitas dan acuan penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan semakin lengkap, selanjutnya untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan tersebut telah diterbitkan Keputusan Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor 46/DPKP/SK/04/2018 tertanggal 24 April 2018 tentang Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (PKP, 2016). Penetapan Kawasan Perdesaan dan RPKP dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan mempertimbangkan berbagai hal antara lain inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, sarana dan prasarana yang mendukung, usulan dari pemerintah desa, maupun rencana dan program pembangunan kabupaten/kota/desa di masa mendatang (RPJM Daerah dan RPJM Desa) dan RTRW Kabupaten/Kota.

Berdasarkan SK penetapan kawasan perdesaan Nomor 423 Tahun 2020 telah ditetapkan lokasi kawasan perdesaan di Kabupaten Lombok Tengah dengan nama KPPN Praya, dengan komoditas unggulan hasil analisis dan rebug warga yaitu padi dan tembakau. Tembakau virgina dominan di Kecamatan Praya Barat, yang tersebar di merata di seluruh desa. Kawasan perdesaan di KPPN Lombok Tengah ini berstatus Mandiri. Kawasan Perdesaan Mandiri adalah

kawasan perdesaan yang kelembagaannya sudah bekerja mengembangkan komoditas unggulan dan produksinya telah dipasarkan dan dipromosikan, namun pengembangan komoditas unggulan belum terpadu dengan sektor lainnya. Produk-produk budaya mulai dimanfaatkan untuk pengembangan komoditas unggulan (Perdesaan, 2018) . KPPN Praya dikembangkan sebagai kawasan agrowisata yang ramah lingkungan, artinya kegiatan pertanian yang berdaya saing akan menjadi muatan utama dalam konsep pengembangan kawasan yang dibangun dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pada kawasan prioritas ini, selain direncanakan pembangunan pusat pengolahan padi dan tembakau terpadu juga perlu dikembangkan kawasan perdagangan dan jasa, penataan dan pembangunan kawasan wisata Pantai Selong Belanak dan Pantai Mawi. Kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan sinergi yang efektif dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan di kawasan perdesaan (Ermaya, 2016). Sinergi antara kelompok masyarakat dan pemerintah memiliki peran krusial dalam mendukung pembangunan daerah pedesaan di Kabupaten Lombok Tengah. Partisipasi masyarakat memiliki peranan penting dalam pengembangan praktik-praktik berkelanjutan serta memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal dengan memberikan lapangan pekerjaan dan peluang bisnis (Mishra et al., 2022). Hak partisipasi masyarakat dalam semua tahapan pembangunan menjadi aspek kunci dalam menjadikan mereka sebagai subjek yang berperan dalam pembangunan yang berkelanjutan (Siregar, 2023).

Indikator dimensi ekonomi yang paling berpengaruh dalam pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Lombok Tengah mencakup berbagai faktor yang secara langsung mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Variabel/peubah yang termasuk dalam komponen penyusunannya meliputi modal sumber daya alam dan finansial pada kawasan perdesaan seperti: Pengembangan Komoditas Unggulan Kawasan perdesaan, Pelibatan Masyarakat dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Pengembangan Komoditas Unggulan (Kelembagaan Ekonomi), Peran BUMDES dan atau BUMDES Bersama Mengembangkan Komoditas Unggulan, Pengembangan Jejaring Kawasan perdesaan/klaster, Promosi Komoditas Unggulan Kawasan Perdesaan/Klaster, Sertifikasi/Standarisasi Produk yang Dihasilkan (mengarah pada peningkatan kualitas), Tingkat Melek Keuangan Masyarakat (perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank) dan Kepemilikan dan/atau Penguasaan Lahan (Perdesaan, 2018). Adapun penjelasan terkait setiap variabel/peubah tersebut sebagai berikut:

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel/Peubah Dimensi Ekonomi

No	Variabel/Peubah	Definisi Operasional
1.	Pengembangan Komoditas Unggulan Kawasan perdesaan	Komoditas unggulan Kawasan perdesaan dikembangkan mulai dari hulu (produksi), pengolahan, sampai pemasaran (hilir) dan terkait dengan pengembangan komoditi lainnya dalam suatu rantai nilai vertikal dan horisontal terpadu
2.	Pelibatan Masyarakat dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Pengembangan Komoditas Unggulan (Kelembagaan Ekonomi)	Pelaku utama adalah masyarakat dan UMKM dalam mengembangkan komoditas unggulan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dan mulai dari hulu sampai hilir.

3.	Peran BUMDES dan atau BUMDES Bersama Mengembangkan Komoditas Unggulan	BUMDES dan atau BUMDES Bersama mempunyai peran yang signifikan terhadap pengembangan komoditas unggulan dari mulai produksi, pengolahan, sampai pemasaran.
4.	Pengembangan Jejaring Kawasan perdesaan/klaster	Kawasan perdesaan/klaster yang dibangun terkait dengan kawasan perdesaan/klaster lainnya pada wilayah yang berdekatan dalam satu kabupaten maupun kabupaten/provinsi lainnya.
5.	Promosi Komoditas Unggulan Kawasan Perdesaan/Klaster	Kawasan perdesaan/klaster mempromosikan produk unggulan melalui berbagai media (website, ekspo/pameran dll) baik secara lokal, nasional maupun internasional.
6.	Sertifikasi/Standarisasi Produk yang Dihasilkan (mengarah pada peningkatan kualitas)	Produk yang dihasilkan sudah memiliki sertifikat baik secara nasional, maupun internasional.
7.	Tingkat Melek Keuangan Masyarakat (perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank)	Tingkat pemanfaatan jasa keuangan melalui bank/lembaga keuangan bukan bank oleh masyarakat di Kawasan perdesaan/klaster
8.	Kepemilikan dan/atau Penguasaan Lahan	Tingkat kepemilikan dan penguasaan lahan yang ada di kawasan perdesaan oleh masyarakat yang ada kawasan perdesaan/klaster tersebut.

Strategi pengembangan kawasan perdesaan yang efektif pada indikator dimensi ekonomi di Kabupaten Lombok Tengah adalah pentingnya kolaborasi dan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk kelompok masyarakat dan pemerintah, dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di daerah pedesaan. Sinergi ini dapat tercermin dalam bentuk program-program kemitraan, kebijakan yang mendukung, serta inisiatif bersama yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain 1) Pemerintah kabupaten, pengelola kawasan dan kepala desa perlu mendorong BUMDES dan BUMDESMA untuk mengembangkan komoditas unggulan di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran. Selain itu, perlu mencari mitra BUMDES dan BUMDESMA dari dunia usaha untuk mengembangkan komoditas unggulan, 2) Pemerintah kabupaten perlu meningkatkan kapasitas kerjasama antar kawasan, serta pengoptimalan kerjasama tersebut dalam pengembangan komoditas unggulan, 3) Perlunya peningkatan kapasitas para pelaku usaha dalam bidang produksi, pengolahan, pemasaran, pengadaan sarana produksi serta standarisasi produk, 4) Perlu adanya sosialisasi tentang pemanfaatan bank dalam mendukung perkembangan usaha serta meningkatkan kerjasama antara pengelola kawasan dan atau BUMDES dengan perbankan untuk memudahkan akses kredit bagi masyarakat, 5) Kepala Desa perlu mendorong kesepakatan di antara anggota masyarakat agar tidak menjual lahannya kepada penduduk/pengusaha di luar kawasan serta meminta kepada pemerintah kabupaten untuk menerbitkan kebijakan (PERDA) tentang pelarangan penjualan lahan-lahan kepada penduduk/pengusaha di luar Kawasan, 6) Pemerintah kabupaten dan pengelola kawasan perlu melakukan sosialisasi dan fasilitasi peningkatan kapasitas tentang sertifikasi / standarisasi baik nasional /internasional, 7) Perlunya identifikasi cara dan alat untuk

mempromosikan komoditas unggulan di forum nasional maupun internasional misalnya dalam expo atau event-event internasional. Sinergi antara kelompok masyarakat dan pemerintah dalam melakukan strategi yang efektif memiliki peran krusial dalam mendukung pembangunan daerah pedesaan di Kabupaten Lombok Tengah.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Pengembangan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Lombok Tengah dengan nama KP Praya memiliki produk unggulan padi dan tembakau, dimana nilai Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (IPKP) dengan status mandiri. Berdasarkan dimensi ekonomi, kawasan perdesaan ini sudah mengembangkan komoditasnya namun masih secara parsial. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan komoditas unggulan masih sedikit. Keberadaan Bumdes Bersama belum berjalan maksimal dalam pengembangan komoditas unggulan secara terpadu namun sudah ada produk unggulan yang memiliki sertifikat maupun standar secara nasional serta sudah ada keterkaitan antara kawasan perdesaan dengan kawasan perdesaan lainnya dalam rangka pengembangan produk unggulan agar berkembang lebih baik.

Penelitian dengan judul "Strategi Pengembangan Kawasan Perdesaan pada Indikator Dimensi Ekonomi di Kabupaten Lombok Tengah" mengungkapkan bahwa pengembangan ekonomi di daerah pedesaan dapat ditingkatkan melalui berbagai strategi berbasis teknologi dan intervensi yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa sektor-sektor seperti pertanian, pariwisata, serta penyediaan layanan dasar seperti listrik, gas, dan air bersih memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, terdapat kesenjangan dalam implementasi dan akses terhadap teknologi di semua wilayah pedesaan, yang diakibatkan oleh keterbatasan infrastruktur dan pengetahuan digital masyarakat. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya meningkatkan investasi dalam infrastruktur teknologi dan program pelatihan digital untuk masyarakat pedesaan.

Ada beberapa hal untuk mewujudkan pelaksanaan program yang lebih baik kedepannya. Pertama, perlunya membangun kesamaan persepsi dari program pengembangan KPPN. Kedua, legalitas produk (ketika mempunyai konsensus maka harus dipastikan tidak ada pihak yang kemudian melepaskan diri atau meninggalkan konsensus yang telah dibuat). Ketiga, meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi. Meningkatkan koordinasi relatif mudah pada saat tahap perencanaan, akan tetapi lebih sulit untuk menjaga koordinasi pada saat perencanaan sudah dihasilkan. Keempat, peran pemerintah daerah. Peran Pemerintah Kabupaten untuk menindaklanjuti terimplementasinya program dalam RPKP yang sudah dihasilkan menjadi kunci keberhasilan pengembangan kawasan perdesaan. Diperlukan integrasi program SKPD dalam perencanaan pembangunan kawasan. Untuk menjaga kelangsungan kawasan perdesaan perlu dibentuk kelembagaan yang akan mengelola kawasan, dapat dalam bentuk BUMDes Bersama, atau lembaga lain yang dianggap mampu. Selain itu perlu dioptimalkan peran pendamping kawasan perdesaan. Kelima, harus dilakukan monitoring dan evaluasi yang ketat sebagai fungsi pengendalian apabila ada penyimpangan dapat langsung dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan. Selain itu juga perlu dibangun semangat kewirausahaan agar pelaku usaha termasuk masyarakat setempat bisa masuk ke dalam kawasan perdesaan dan dapat ikut menikmati perkembangan kawasan perdesaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian paper berjudul "Strategi Pengembangan Kawasan Perdesaan pada Indikator Dimensi Ekonomi di Kabupaten Lombok Tengah", dosen pembimbing, Dinas PMPD DUKCAPIL Provinsi NTB khususnya pada Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan berbagai instansi terkait yang telah memberikan data dan informasi yang sangat berharga untuk penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kawasan pedesaan di Kabupaten Lombok Tengah dan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya di bidang yang sama.

REFERENSI

- Cahyo Diarto, H., Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Potensi di, P., Cahyo Diartho, H., Ilmu Ekonomi, J., Ekonomi dan Bisnis, F., & Jember Jalan Kalimantan, U. (2017). Perencanaan Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Potensi Di Kabupaten Bondowoso (Potential Rural Area Development Planning in Bondowoso District). *Journal Ekuilibrium*, *II*(1), 1–9.
- Ermaya, B. S. (2016). KEMANDIRIAN DESA DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PEDESAAN. *LITIGASI*. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v16i2.36>
- Iskandar, A. H. (2021). SDG's DESA PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUA PEMBANGUNAN NASIONAL BERKELANJUTAN. *Wacana Kinerja*.
- KEMENDES-PDPT. (2016). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi*.
- Mishra, A., Singh, A. K., Parida, S. P., Pradhan, S. K., & Nair, J. (2022). Understanding Community Participation in Rural Health Care: A Participatory Learning and Action Approach. *Frontiers in Public Health*. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.860792>
- Perdesaan, D. P. P. K. (2018). *Profil Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan*. Profil Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan.
- PKP, D. (2016). *Kep. Dirjen PKP N0.14 Tahun 2016*. July, 1–23.
- Setkab. (2016). Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi*, *5*, 1–18. <http://www.keuandangdesa.com/wp-content/uploads/2016/04/Permendes-Nomor-05-Tahun-2016-Pembangunan-Kawasan-Perdesaan.pdf>
- Siregar, M. (2023). PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM MEMPERTAHANKAN DESA MANDIRI (Studi Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban). *JURNAL ILMU SOSIAL Dan ILMU POLITIK*. <https://doi.org/10.30742/juispol.v3i1.2889>
- Soleh, A. (2017). Strategi pengembangan potensi desa. *Jurnal Sungkai*.
- Wahyuni, D. (2019). Pengembangan Desa Wisata Pentingsari, Kabupaten Sleman dalam Perspektif Partisipasi Masyarakat. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v10i2.1386>
- Yuswarni, Achmad Firdaus, & Riyanda, R. (2023). The Community Participation in Improving Pendapatan Asli Desa (PADes) and Strengthening the Community Economy in Cibereum Village, Cisarua Districts, Bogor Regency. *JOELS: Journal of Election and Leadership*. <https://doi.org/10.31849/joels.v4i1.11060>